

ANALISIS KEMISKINAN BERDASARKAN FAKTOR TINGKAT PENDIDIKAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI ACEH

Fitri Yanti

Universitas Negeri Yogyakarta
fitriyanti.2021@student.uny.ac.id

Abstract

Poverty can be seen from the standard of decent living, meaning that we see whether a person or family is able to meet their basic needs. It is further interpreted that poverty is a condition where basic needs or basic needs are not met so that a decent standard of living is not achieved. The basic needs referred to are food, clothing, housing or shelter, education and health. This research aims to analyze poverty based on the level of education factors and the Human Development Index (PMI) which influence poverty in the province of Aceh. The research method used in this research is descriptive quantitative using secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The results of this research show that the level of education and the Human Development Index influence poverty in Aceh Province. The higher the level of education and the Human Development Index, the lower the poverty rate.

Keywords: *Poverty, Education, Human Development Index*

Abstrak

Kemiskinan dapat dilihat dari standar hidup layak, artinya kita melihat apakah seseorang atau suatu keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Lebih lanjut diartikan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar sehingga standar hidup layak tidak tercapai. Kebutuhan dasar yang dimaksud seperti makanan, pakaian, rumah atau tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemiskinan berdasarkan faktor tingkat Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berpengaruh terhadap kemiskinan provinsi Aceh. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia maka semakin rendah angka kemiskinan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks yang bersifat multidimensi dan tidak secara mudah dapat dilihat dari suatu angka absolut.¹ Perbedaan wilayah dan beragamnya budaya menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan menjadi berbeda pula. Kemiskinan yang terjadi di suatu provinsi khususnya provinsi Aceh tentunya disebabkan oleh banyak faktor. Namun pada penelitian ini peneliti mengambil dua faktor yang dianggap sangat penting terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh yaitu faktor tingkat pendidikan dan faktor indeks pembangunan manusia.

Keterkaitan antara kualitas SDM dengan tingkat kemiskinan dianalisis oleh ahli Ekonomi Pembangunan Nurkse dengan konsep lingkaran setan kemiskinan.² Lingkaran kemiskinan mengandung makna bahwa siklus kemiskinan sebenarnya bermotif sama dengan lingkaran setan.³ Pada keadaan miskin masyarakat maupun wilayah tersebut terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Keterbelakangan gizi, minimnya pendidikan, infrastruktur yang belum memadai, lalu ketidaksempurnaan pasar terutama dalam hal informasi, serta kurangnya modal menjadikan produktivitas masyarakat menjadi rendah.⁴ Rendahnya produktivitas berdampak pada jumlah pendapatan yang mereka terima. Semakin sedikit pendapatan yang diterima akan berimplikasi pada tabungan dan investasi yang jumlahnya semakin kecil bahkan tidak ada. Sehingga rendahnya investasi bahkan tidak adanya investasi pada akhirnya menimbulkan keterbelakangan gizi, dan siklus ini akan terus menerus menjebak masyarakat dalam lingkaran kemiskinan (poverty circle).

Lingkaran setan tersebut dimulai dari pendapatan yang rendah, selanjutnya mempengaruhi besarnya tabungan yang semakin rendah bahkan sampai tidak ada. Akhirnya sumber daya manusia (tingkat pendidikan dan kesehatan) yang tersedia tidak cukup berkualitas, sehingga mempengaruhi tingkat produktivitas yang nantinya kembali mempengaruhi pendapatan.⁵ Lingkaran itu tidak akan pernah terpotong apabila tidak ada satu bagian saja yang dihilangkan. Oleh karena itu, lingkaran setan kemiskinan tersebut adalah keharusan bagi semua pihak terutama pemerintah untuk memiliki keinginan yang kuat untuk memutus alur tersebut.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dapat menjadi factor terjadinya kemiskinan. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja. Produktivitas yang rendah akan mengakibatkan rendahnya pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti

¹ Rusdarti & Lesta Karolina Sebayang, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Economica*, Vol. 9, No 1, 2013, hlm, 4.

² M.L Jinghan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta :Penerbit Pajar Interpratama, 2004), hlm, 41.

³ Erwa Agus Purwanto, Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonsia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 3, 2007, hlm. 296.

⁴ Murdiyana dan Mulyana, ANALISIS KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA, *JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN*, Vol. 10, No. 1, hlm, 75

⁵ Kunarjo, Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, (Jakarta : UI-Press, 2002), hlm.51

tertarik untuk menganalisis keterkaitan tingkat pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mencoba menganalisis keterkaitan antara tingkat pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan (Jumlah Penduduk miskin). Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh berupa data sekunder dengan menggunakan data time series dari tahun 2020-2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

KONSEP DASAR

Kemiskinan

Definisi Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi.⁶ Rendahnya tingkat kehidupan yang sering sebagai alat ukur kemiskinan hanyalah merupakan salah satu mata rantai dari munculnya lingkaran kemiskinan.⁷ Sementara itu, kemiskinan dapat dilihat dari standar hidup layak, artinya kita melihat apakah seseorang atau suatu keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Lebih lanjut diartikan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar sehingga standar hidup layak tidak tercapai. Kebutuhan dasar yang dimaksud seperti makanan, pakaian, rumah atau tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.⁸

Menurut Todaro mengemukakan kemiskinan absolut, yaitu sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.¹⁰ Penduduk tersebut hidup dibawah tingkat pendapatan rill minimum tertentu atau dibawah garis kemiskinan internasional. Adapun kondisi kemiskinan adalah satu dari tiga kriteria penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara.¹¹ Apabila suatu bangsa telah berhasil tumbuh kemakmurannya secara rata-rata namun kemiskinan masih terus menerus dirasakan oleh sebagian penduduknya, maka tentulah sulit mengatakan bahwa pembangunan telah benar-benar berhasil.

⁶ Radhitia Brianjaya, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Keluarga Miskin di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, *Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. V, No. 1, 2018, hlm, 40.

⁷ Laga Priseptian, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, *Forum Ekonomi*, Vol. 24, No. 1, hlm, 46.

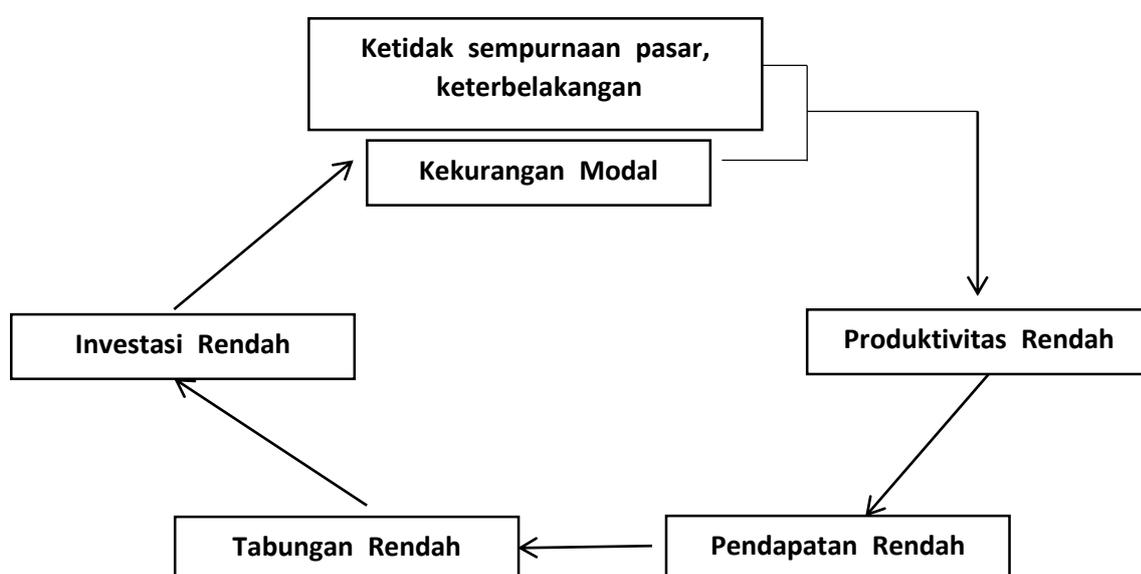
⁸ Suharto. S, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : Reflika Aditama, 2010), hlm, 31.

⁹ Indra Maipita, *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*, (Malang : Universitas Muhammadiyah, 2014). Hlm, 259.

¹⁰ Todaro, dan Smith. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm, 24.

¹¹ Syaiful Bahri, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta 2010), hlm, 41.

Kuncoro mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi.¹² Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidakseimbangan pada kepemilikan sumberdaya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*).



Gambar 1. Lingkaran Kemiskinan. Sumber: R. Nurkse (1961)

Teori ini ditemukan oleh R. Nurkse (1961) yang mengatakan “a poor country is poor because it is poor” (Negara miskin itu miskin karena dia miskin). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini. Berikut gambar lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*).

¹² Kuncoro, Mudrajat, Otonomi dan Pembangunan Daerah, (Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Jakarta: PT, Erlangga, 2004), hlm, 31.

Indeks Pembangunan Manusia

Dalam konteks pembangunan ekonomi di suatu daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam pola dasar pembangunan daerah. Hal ini menandakan bahwa IPM menduduki satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah. Fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan dan pembangunan yang terarah. IPM yang merupakan tolok ukur pembangunan suatu wilayah sebaiknya berkorelasi positif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut karena diharapkan suatu daerah yang memiliki IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan masyarakat akan rendah.¹³

Sumber daya manusia yang berkualitas adalah harapan bagi suatu daerah yang harus dicapai agar masyarakat dapat terhindar dari kemiskinan. Sumber daya manusia dapat diukur Berdasarkan pada angka harapan hidup, pendidikan dan standard hidup yang layak. Setiap daerah memiliki indeks yang berbeda hal ini mencerminkan kualitas hidup di masing masing daerah berbeda sesuai dengan karakteristik daerah dan sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya indeks pembangunan manusia maka setiap daerah dapat diukur kualitas hidupnya dan taraf hidup agar daerah tersebut dapat melakukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut.

IPM diperkenalkan pertama sekali pada tahun 1990. IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge) dan hidup layak (living standards). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (purchasing power parity). IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu:

- 1) Indeks Harapan Hidup
- 2) Indeks Pendidikan
- 3) Indeks Standar Hidup Layak

¹³ Kanbur, R and Lyn, "The Evolution of Thinking about Poverty: Exploring the Interactions," Department of Agricultural, Resource and Managerial Economics, Paper 99-24, 1999, Cornell University.

HASIL Table 1. Penduduk Miskin Provinsi Aceh, Menurut Kabupaten Tahun 2020-2021

No	Kabupaten	2020			2021		
		Jlh Penduduk	Jlh penduduk Miskin	Persentase penduduk Miskin%	Jlh Penduduk	Jlh penduduk Miskin	Persentase penduduk Miskin%
1	SIMEULUE	92.87	17.34	18.49	93,76	18.25	18.98
2	ACEH SINGKIL	126.51	25.43	20.20	128,38	25.48	20.36
3	ACEH SELATAN	232.41	30.91	12.87	234,63	32.25	13.18
4	ACEH TENGGARA	220,86	28.98	13.21	224,12	29.31	13.41
5	ACEH TIMUR	422.40	62.34	14.08	427,03	63.69	14.45
6	ACEH TENGAH	215.58	32.48	15.08	218,68	32.72	15.26
7	ACEH BARAT	198.74	39.06	18.34	200,58	39.83	18.81
8	ACEH BESAR	405.54	59.70	13.84	409,53	60.26	14.05
9	PIDIE	435.28	86.39	19.23	439,40	88.53	19.59
10	BIREUEN	436,42	62.42	13.06	439,79	63.02	13.25
11	ACEH UTARA	602,79	106.41	17.02	608,11	109.49	17.43
12	ACEH BARAT DAYA	150,78	24.21	15.93	152,66	25.06	16.34
13	GAYO LUES	99,53	18.42	19.32	101,10	18.61	19.64
14	ACEH TAMIANG	294,36	38.93	13.08	297,52	40.03	13.34
15	NAGAN RAYA	168,39	29.99	17.70	170,59	30.71	18.23
16	ACEH JAYA	93,16	12.11	12.87	94,42	12.63	13.23
17	BENER MERIAH	161,34	28.38	18.89	164,52	28.69	19.16
18	PIDIE JAYA	158,40	31.39	19.19	160,33	31.79	19.55
19	BANDA ACEH	252,90	18.97	6.90	255,03	20.95	7.61

No	Kabupaten	2020			2021		
		Jlh Penduduk	Jlh penduduk Miskin	Persentase penduduk Miskin%	Jlh Penduduk	Jlh penduduk Miskin	Persentase penduduk Miskin%
20	SABANG	41,20	5.27	14.94	42,07	5.33	15.32
21	LANGSA	185,97	18.65	10.44	188,88	19.78	10.96
22	LHOKSEUMAWE	188,71	22.69	10.80	189,94	23.38	11.16
23	SUBULUSSALAM	90,75	14.46	17.60	92,67	14.46	17.65
	Aceh	5 274,87	814.91	14.99	5 333,73	834.24	15.33

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik, 2020-2021)

Setelah diperoleh data jumlah penduduk miskin dan persentase yang ada di provinsi Aceh, maka ditemukan bahwa kelas kemiskinan terbesar dengan interval (20%-100%) terdapat di kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan kabupaten dengan kelas kemiskinan sangat terendah (tidak miskin) dengan interval (0%-10%) adalah kabupaten Banda Aceh. Selebihnya sebanyak 20 kabupaten menempati kelas kemiskinan sedang dengan interval (10%-20%). Maka rata-rata kemiskinan di Provinsi Aceh menempati posisi kelas kemiskinan rendah yaitu 14.99% pada tahun 2020 dan 15.33% pada tahun 2021.

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa tidak terjadi perubahan yang besar dari tahun 2020-2021 karena tiap kabupaten masih berada pada kelas kemiskinan yang sama seperti tahun sebelumnya. Hal itu terjadi karena durasi tahun yang diteliti sangat sedikit sehingga perubahan data juga sangat kecil.

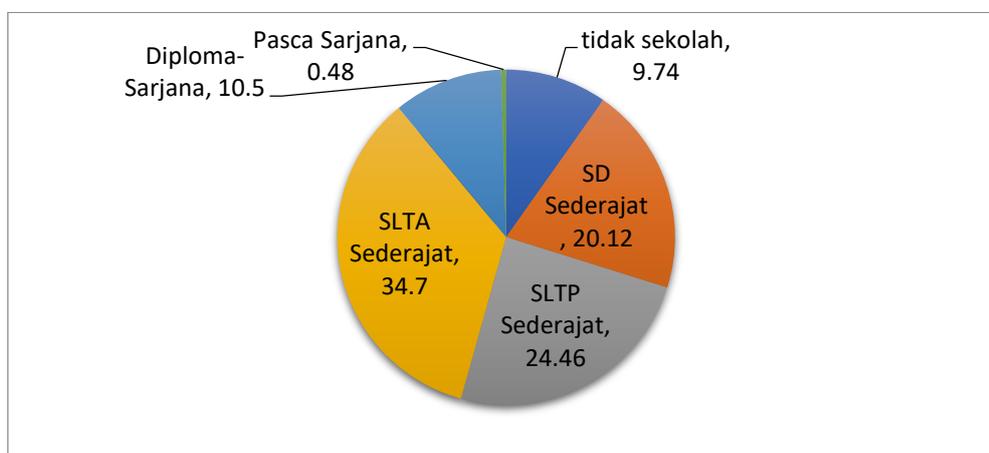
Analisis Faktor

Kemiskinan yang terjadi di suatu provinsi khususnya provinsi Aceh tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Pada penelitian ini peneliti mengambil dua faktor yang dianggap sangat penting terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh yaitu faktor tingkat pendidikan dan faktor indeks pembangunan manusia.

1. Factor Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Aceh pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya, karena pendidikan menjadi kunci bagi pencapaian kemajuan bangsa. Tingkat pendidikan yang rendah telah menyebabkan rendahnya tingkat produktif yang berimbas pada buruknya tingkat penghasilan dan rendahnya kualitas kehidupan bangsa Indonesia. Data persentase tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk Provinsi Aceh dapat kita lihat pada grafik berikut:

Grafik 1. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang dimiliki



Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik, 2021)

Output pendidikan Aceh dapat ditelaah dari persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki. Secara umum, proporsi masyarakat Aceh yang memiliki ijazah dengan tingkat pendidikan SD/ sederajat sebesar 20,10 persen. Selanjutnya persentase penduduk yang memiliki ijazah SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat yaitu masing-masing sebesar 24,46 persen dan 34,7 persen. Sementara itu, penduduk Aceh yang sudah memiliki ijazah perguruan tinggi yaitu DI-DIV dan S1 sebesar 10,50 persen, dan yang sudah memiliki ijazah S2 dan S3 sebesar 0,48 persen. Di sisi lain, persentase penduduk Aceh usia 15 tahun ke atas yang tidak/ belum menamatkan pendidikan masih ada, yaitu sebanyak 9,70 persen.

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa penduduk Provinsi Aceh hanya memiliki rata-rata ijazah tertinggi adalah SMA/ sederajat. Bahkan 9,70 persen penduduk yang tidak memiliki pendidikan sama sekali. Artinya masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pendidikan sama sekali. Hal tersebut akan menyebabkan rendahnya produktifitas yang akan berimbas pada rendahnya pendapatan sehingga meningkatkan kemiskinan. Oleh karena itu pendidikan adalah salah satu factor penunjang terputusnya rantai kemiskinan rantai kemiskinan.

2. Faktor Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk). Komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ada 4 yaitu: Angka harapan hidup, Angka melek huruf, Lama sekolah serta pengeluaran per kapita. Dalam jangka satu tahun dari 2020 ke 2021 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Aceh cukup positif artinya ada perkembangan ke tataran lebih baik. IPM provinsi Aceh dari tahun 2020-2021 terjadi peningkatan yaitu dari 71,99 menjadi 72,18. Untuk IPM setiap kabupaten dapat dilihat ada tabel berikut:

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh, Menurut Kabupaten Tahun 2020-2021

No	Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
		2020	2021
1	Simeulue	66.03	66.41
2	Aceh Singkil	68.94	69.22
3	Aceh Selatan	67.12	67.44
4	Aceh Tenggara	69.37	69.44
5	Aceh Timur	67.63	67.83
6	Aceh Tengah	73.24	73.37
7	Aceh Barat	71.38	71.67
8	Aceh Besar	73.56	73.58
9	Pidie	70.63	70.70
10	Bireuen	72.28	72.33
11	Aceh Utara	69.33	69.46
12	Aceh Barat Daya	66.75	66.99
13	Gayo Lues	67.22	67.56
14	Aceh Tamiang	69.24	69.48
15	Nagan Raya	69.18	69.31
16	Aceh Jaya	69.75	69.84
17	Bener Meriah	72.98	73.27
18	Pidie Jaya	73.20	73.60
19	Kota Banda Aceh	85.41	85.71
20	Kota Sabang	75.78	76.11
21	Kota Langsa	77.17	77.44
22	Kota Lhokseumawe	77.31	77.57
23	Kota Subulussalam	64.93	65.27
ACEH		71.99	72.18

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik, 2020-2021)

Dari table 2 di atas dapat kita ketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi adalah kabupaten Kota Banda Aceh pada tahun 2020-2021 adalah sebesar 85,41%, dan 55,71%. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia IPM terendah adalah kabupaten Kota Subulussalam pada tahun 2020-2021 dengan angka 64,93% dan 65,27%. Konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 3. Katagori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Katagori
< 50,0	Rendah
50,0 – 79,9	Sedang
>80.0	Tinggi

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Berdasarkan tabel 3, kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Provinsi Aceh menempati kategori sedang atau menengah, sedangkan untuk kabupaten hanya kabupaten Kota Banda Aceh yang berada di kategori IPM tinggi yaitu sebesar 85,41%, selebihnya semua berada pada kategori tengah “sedang” dan tidak ada kabupaten di provinsi Aceh yang berada di kategori rendah. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dalam parameter IPM di mana hal ini terjadi karena penduduk miskin yang tinggal di provinsi Aceh memiliki oportunitas pendapatan produktif dalam pertumbuhan ekonomi seperti dalam (Kanbur, 1999) yang artinya semakin besar IPM dalam kehidupan penduduk miskin maka semakin besar peluang tenaga kerja yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya.

Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan kemiskinan adalah terdapat hubungan penting antara IPM dan kapasitas pendapatan produktif. Pendapatan merupakan penentu utama dan hasil dari pembangunan manusia. Orang miskin menggunakan tenaga mereka untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi kemiskinan akibat kurangnya pendidikan, serta gizi dan kesehatan yang buruk mengurangi kapasitas mereka untuk bekerja. Dengan demikian, akibat rendahnya IPM orang miskin tidak dapat mengambil keuntungan oportunitas pendapatan produktif karena terjadinya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penyediaan pelayanan sosial dasar merupakan unsur penting dalam penanganan kemiskinan (Kanbur, 1999). Hal ini membuktikan bahwa data kemiskinan ada hubungannya dengan data IPM dan tingkat pendidikan, di mana semakin tingginya IPM dan tingkat pendidikan suatu kabupaten maka semakin rendah tingkat kemiskinan di kabupaten tersebut.

PENUTUP

Dari hasil analisis di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya yaitu tingkat kemiskinan di provinsi Aceh tahun 2020 dan 2021 didapatkan hasil bahwa ada 3 kategori kelas kemiskinan yaitu kategori miskin tinggi, sedang dan rendah. Kategori kelas miskin tersebut berdasarkan Permenkeu Nomor 226/PMK.07/2012. Rata-rata kemiskinan di Provinsi Aceh menempati posisi kelas kemiskinan rendah yaitu 14.99% pada tahun 2020 dan 15.33% pada tahun 2021. Tidak terjadi perubahan yang besar dari tahun 2020-2021 karena tiap kabupaten masih berada pada kelas kemiskinan yang sama seperti tahun sebelumnya. Hal itu terjadi karena durasi tahun yang diteliti sangat sedikit sehingga perubahan data juga sangat kecil. Pendidikan di Provinsi Aceh hanya memiliki rata-rata ijazah tertinggi adalah SMA/ sederajat. Bahkan 9,70 persen penduduk yang tidak memiliki pendidikan sama sekali. Artinya masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pendidikan sama sekali. Hal tersebut menyebabkan rendahnya produktifitas yang berimbas pada rendahnya pendapatan sehingga meningkatkan angka kemiskinan. Maka dari itu pendidikan adalah salah satu factor penunjang terputusnya rantai kemiskinan karena tingkat pendidikan yang semakin tinggi dapat membawa penduduk lebih berpeluang untuk melepaskan diri dari kemiskinan,

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Erwa Purwanto, Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 3, 2007, hlm. 296.
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2020. Aceh Dalam Angka 2020. BPS Provinsi Aceh. Banda Aceh.
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2021. Aceh Dalam Angka 2021. BPS Provinsi Aceh. Banda Aceh.
- BPS (Badan Pusat Statistik). www.bps.go.id : kemiskinan. Di Akses pada tanggal 25 Maret 2022.
- Brianjaya, Radhitia Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Keluarga Miskin di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, *Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. V, No. 1, 2018,
- Jinghan, M.L., 2004. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Penerbit Pajar Interpretama, Jakarta
- Kanbur, R and Lyn S. 1999, "The Evolution of Thinking about Poverty: Exploring the Interactions," Department of Agricultural, Resource and Managerial Economics Paper 99-24, Cornell University.
- Kuncoro, Mudrajat, 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah, (Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang), PT, Erlangga, Jakarta.

Murdiyana dan Mulyana, ANALISIS KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA, JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN, Vol. 10, No. 1, hlm, 75

Napitupulu, A.S. 2007. Pengaruh Indikator Komposit IPM Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara. Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara.

Nurkse, Ragnar. 1961. Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. Oxford University Press. New York

Priseptian, Laga Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, *Forum Ekonomi*, Vol. 24, No. 1,

Suharto. S, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung : Reflika Aditama, 2010